

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dilihat dari indikator Produktivitas belum maksimal dan dapat ditingkatkan kembali, hal tersebut terkait jumlah Sumber Daya Manusia dalam penanganan saat bencana banjir yang dapat secara merata di sebarakan ke lokasi banjir tanpa melihat pertimbangan publikasi. Pengembangan SDM tim TRC juga dapat ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian pada penanganan darurat saat banjir diantaranya bidang kesehatan, kebakaran, darurat kelistrikan, penanganan hewan liar dll.
2. Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta dilihat dari indikator Kualitas Layanan terkait penanganan saat bencana banjir di wilayah Kampung Melayu sudah cukup baik dilihat dari pendistribusian logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta bersinergi bersama Dinas Sosial telah mendistribusikan bantuan dengan tepat sasaran sesuai dengan data korban di posko pengungsian. Terdapat kesalahpahaman perihal warga yang tidak mendapatkan bantuan logistik namun itu merupakan pilihan warga untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Terkait dengan alat bantu terjadi human erorr di wilayah Kampung Melayu karena pasalnya banyak barang yang tidak dikembalikan ke Kelurahan kampung melayu. Dan terkait pengevakuasi kelompok rentan BPBD Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, mengutamakan kelompok rentan yaitu lansia, ibu hamil, dan orang sakit untuk ditempatkan di tempat yang berbeda dengan warga diluar klasifikasi tersebut.
3. Indikator Responsivitas terkait penanganan saat bencana banjir di wilayah Kampung Melayu sudah cukup baik ketika bencana terjadi Ketua RW dan

Lurah setempat memberikan informasi bahwa tim dari BPBD selalu datang lebih awal untuk melakukan pendataan dan inventarisir kondisi untuk dilakukan selanjutnya pendistribusian logistik yang diperlukan oleh masyarakat. Hanya saja saat bencana terjadi terdapat ketidaksesuaian SOP dimana saat melakukan Tindakan cepat, administrasi menjadi tertinggal terutama pengadaan logistik.

4. Indikator Responibilitas saat terjadi bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Koordinasi sudah melakukan kinerjanya dengan baik dapat dilihat dari kelancaran koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga/Stekholder terkait, BPBD bersinergi dengan Dinas Sosial untuk menyiapkan makanan berat, BPBD menyiapkan makanan ringan atau siap saji, Dinas Kesehatan mempersiapkan tenaga medis untuk standby di posko pengungsian dan menyiapkan obat-obatan serta mobil ambulance, dan PLN untuk memadamkan listrik jika banjir sudah semakin tinggi.

Hanya terdapat beberapa instansi diluar pengawasan BPBD memberikan bantuan yang tidak tepat guna perihal alat bantu.

5. Kinerja BPBD pada Indikator Responibilitas sudah cukup baik dilihat dari pertanggungjawaban BPBD dalam memposting program-program maupun informasi terkait bencana banjir meliputi Tinggi Muka Air, Waspada curah hujan, pendistribusian bantuan logistik dan postingan sosialisasi terkait persiapan sebelum terjadi bencana.

Hanya saja beberapa informasi tidak cukup update sesuai dengan waktu kejadian sehingga beberapa informasi yang saat itu terjadi terkesan tidak disampaikan oleh BPBD seperti penanganan banjir di wilayah Kampung melayu baik pada saat identifikasi, distribusi logistic maupun penanganan pengungsi lainnya.

### **A. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Saat Bencana Banjir.**

Dalam mewujudkan kinerja BPBD seringkali hambatan itu datang dari sistem koordinasi baik dalam instansi itu sendiri maupun dari mitra lain. Dimana masih kurangnya koordinasi antara pegawai dan atasan yang menyebabkan semangat mencapai kinerja suatu organisasi menjadi tidak sejiwa. Menurut Handayani Ningrat, yang menjadi hambatan dalam koordinasi yaitu hambatan-hambatan yang disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta masih kekurangan personil yang ahli dalam penanganan saat bencana banjir.
2. BPBD belum memiliki perahu kano untuk mengevakuasi korban banjir, karena mengingat wilayah Kampung Melayu merupakan area gang-gang sempit yang tidak memungkinkan menggunakan perahu karet.
3. Dari sisi masyarakat masih terdapat warga yang tidak ingin dievakuasi oleh tim BPBD, dan masih banyak alat bantu evakuasi yang tidak dikembalikan ke lurah setempat.
4. Dari sisi kendali masih ada ego sektoral yang seharusnya lembaga lain berkoordinasi dengan BPBD terkait segala bentuk bantuan, namun mereka bergerak sendiri sehingga terdapat bantuan yang tidak tepat guna.

### **6.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, Adapun saran-saran berikut ini:

1. Terkait dengan penguatan tim TRC diharapkan BPBD melakukan pelatihan lebih kuat lagi terhadap petugas tim TRC yang secara taktikal mampu menguasai beberapa aspek (Kesehatan, kelistrikan, kebakaran dll) pelatihan diharapkan sesuai dengan klasifikasinya sehingga jika terjadi bencana dapat

memberikan dukungan dengan respon waktu yang baik. Dan mempertegas tugas-tugas oleh masing-masing tim untuk menyebar ke beberapa titik terjadinya bencana, sehingga terlihat kinerja dari tim saat penanganan bencana banjir.

2. Kepada BPBD Provinsi DKI Jakarta disarankan melakukan sosialisasi lebih lagi tidak hanya setahun sekali kepada masyarakat dan relawan bencana terkait penanganan saat bencana bencana banjir, dan melakukan pelatihan serta pendidikan sehingga terbentuk masyarakat yang peduli dengan lingkungan.